

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pinjaman secara *online* atau *financial technology (fintech)* saat ini sedang berkembang di Indonesia. Hal ini dikarenakan, layanan pinjaman *online* ini disebut dapat lebih memudahkan masyarakat. *Fintech* saat ini menjadi salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. *Fintech* merupakan segmen dari dunia *start-up* yang memiliki fokus agar supaya memaksimalkan dalam penggunaan teknologi untuk mengubah, mempercepat, atau mempertajam berbagai aspek di layanan keuangan yang ada. Di mulai dari metode pembayaran, transfer, dana, pinjaman, pengumpulan dana, hingga pengelolaan asset.¹

Pasal 1 ayat (1) PBI No. 19/12/PBI/2017 menjelaskan Tentang Penyelenggaraan *Teknologi Finansial* (selanjutnya disebut PBI *Fintech*):

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

Pinjaman Online merupakan salah satu jenis *startup* yang mulai banyak diminati. Berikut beberapa contoh bisnis yang telah tergabung di dalam *Fintech* diantaranya: Proses jual beli saham, Pembiayaan Peminjaman uang (*lending*) secara *peer to peer*, Transfer dana, Investasi ritel, Perencanaan keuangan (*personal finance*), Dan lainnya. *Financial Technology* mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat menjadi lebih sangat praktis dan efektif. *Financial Technology* juga membantu masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. P2P *Lending* merupakan sebuah layanan *Fintech* yang sangat membantu masyarakat UMKM sehingga mereka dapat meminjam dana dengan mudah walaupun mereka belum memiliki rekening di bank.

¹ Adhi, “Apa itu Finansial Technology (Fintech)”, 2017, <<https://www.money.id/digital/apa-itu-finansialtechnology-fintech-160219n.html>>, 1 November 2019

Permodalan tentunya merupakan sebuah isu yang sangat signifikan tentunya untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan finansial masyarakat.²

Survei yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia melansir bahwasanya Bisnis Indonesia pada Mei 2017 baru 37% penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening bank. Sementara sebesar 27% penduduk dewasa Indonesia memiliki simpanan formal dan 13% memiliki pinjaman formal. Dapat dikatakan bahwa sebanyak 63% warga Indonesia belum dapat menikmati fasilitas keuangan termasuk perbankan. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah pun menargetkan peningkatan rasio masyarakat pengakses layanan bank menjadi 79% pada 2019.³

Kehadiran fisik perbankan dapat dikatakan masih sangat relatif rendah yang pada akhirnya mempengaruhi pula tingkat akses masyarakat terhadap beragam jenis layanan perbankan, termasuk layanan pinjaman. Ketatnya perbankan dalam memilah peminjaan, ditambah tingkat kemelekaran finansial (*financial literacy*) masyarakat Indonesia yang masih cukup rendah, menjadikan layanan pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Berangkat dari hal tersebut muncul berbagai inovasi-inovasi di dalam mengatasi masalah-masalah keuangan salah satu yang paling menarik perhatian adalah kehadiran *fintech* (*Financial Teknologi*) salah satunya munculnya Layanan pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau juga disebut *peer to peer lending* (P2PL).⁴

Sistem *peer to peer lending* (P2PL) sama dengan konsep *marketplace online*, yang juga menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dapat dikatakan bahwa *peer to peer lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan dalam hal pinjam meminjam uang. Menjamurnya para penyedia layanan pinjam-meminjam uang

² <https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/>

³ Awan, Hambatan Akses Fintech, <https://www.awantunai.com>, akses tgl 17 Desember 2019

⁴ Ibid

berbasis teknologi (*fintech*) menawarkan alternatif yang baru, memberikan dengan proses yang mudah dan waktu cepat.⁵

Disamping kelebihan yang ditawarkan oleh perusahaan pinjaman online ada berbagai resiko yang mungkin akan muncul baik dari Peminjam maupun pemberi Pinjaman, berdasarkan laporan dari Yaysan Lembaga Konsumen Indonesia sejak bulan januari sampai dengan bulan maret pada tahun 2018. YLKI telah menerima lebih dari 50 Pengaduan dari Pinjaman Online bahkan hal ini terus bertambah, kebanyakan dari keluhan yang disampaikan yaitu mulai dari cara penagihan hingga sistem perhitungan bunga atau denda yang tidak jelas, ditambah lagi provisi yang tidak ditentukan di awal perjanjian. Bentuk penagihan yang sering dilakukan adalah dengan cara mengancam hingga menagih lewat orang yang nomor handponnya ada dalam daftar kontak milik konsumen. Keluhan banyak datang dari para konsumen yang mendapatkan kompensasi dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi. Ada beberapa perusahaan *fintech* yang tidak menentukan perihal batasan bunga, serta ketidakjelasan denda oleh perusahaan *fintech*. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang diurugikan akan hal tersebut dan peminjam harus mengembalikan uang yang dipinjam dalam jumlah yang besar hal ini akan membuat potensi resiko gagal bayar. Selain itu dengan adanya informasi konsumen dalam database perusahaan *Fintech*, maka terdapat potensi risiko terkait privasi data konsumen maupun data transaksi yang bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.⁶

Namun ternyata, “dikutip dari laman Facebook *LBH Jakarta*, pada Senin (5/11/2018)”, pinjaman *online* ini juga dapat memberikan kesulitan tersendiri untuk penggunanya. LBH atau Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta, pada unggahan Facebooknya menerangkan, sejak Mei 2018, Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta telah menerima pengaduan dari 283 korban

⁵ Indah Cesia Alfianurrahman. 2015. Perlindungan Hukum atas Hak Konsumen Selaku Debitur Terhadap Layanan Pinjaman Berbasis Financial Technology (*Peer to peer landing*). Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang.

⁶ Ibid.

pinjaman online (*fintech*). Dengan berbagai bentuk pelanggaran hukum. LBH Jakarta mencatat, kasus korban pinjaman *online* ini bertambah dengan drastis sejak 2016. Diketahui, pada 2016, jumlah korban pinjaman *online* ini berjumlah 10 orang. Namun, pada 2017, jumlahnya bertambah hingga 65 orang. Di tahun 2018, pinjaman *online* ini bahkan memakan korban dengan jumlah mencapai 120 orang. LBH Jakarta menyebutkan, kasus ini terjadi disebabkan oleh cara-cara penagihan yang tidak selayaknya dilakukan.

Salah satu kasus pinjaman online yang dialami oleh ibu Agustin Cahyani (23) melakukan pinjaman online sebesar Rp1,8 juta rupiah pada akhir September 2018, dan jatuh tempo dalam 13 hari namun ibu Agustin Cahyani belum bisa membayarnya. Meski meminjam Rp1,8 juta, uang yang diterima hanya Rp. 1,3 juta dikarenakan ada potongan administrasi dan Debitur harus mengembalikan pinjaman tersebut sebesar Rp1,9 juta. Dikarenakan mertua dari Debitur operasi mengakibatkan telat dalam melakukan pelunasan, namun pihak Kreditur tidak mau tahu dan setiap harinya bunganya bertambah sebesar Rp.80.000, sementara upah suaminya yang bekerja sebagai tukang muat pasir seharusnya sebesar Rp.75.000.

Karena telat melakukan pembayaran pihak Kreditur menyebarkan informasi pinjaman Debitur ke seluruh daftar kontak di telepon suaminya. Akibat peristiwa tersebut suaminya dikeluarkan dari tempat kerja. Saat data suaminya telah disebar, Ibu Agustin berusaha untuk beberapa kali menghubungi nomor yang telah melakukan penyebaran data tersebut, dan dia dibalas dengan kata-kata kasar. Padahal Debitur beritikad baik untuk membayar hutangnya namun nomor ponsel Debitur di blokir oleh Kreditur. Peristiwa tersebut membuat Debitur semakin khaawatir karna takut menjadi bahan omongan, sampai ke mertua dan takut apabila penyakit stroke kambuh.⁷

⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-46107193> diakses pada pukul 23.10 wib, pada hari rabu bulan oktober.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta setelah menganalisa pengaduan-pengaduan yang masuk ketika melakukan Pos Pengaduan Pinjaman online yang dibuka pada tanggal 4 sampai 25 November 2018 yang lalu. Para pihak *desk collector* penyelenggara aplikasi pinjaman online dalam menagih hutang memang melakukan pengancaman, fitnah, penipuan, pelecehan seksual, penyebaran data pribadi, serta pembuatan “grup khusus” di aplikasi pesan singkat, dan penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam. Pola penagihan utang ini tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK, namun juga dilakukan oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online yang telah terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa terdaptarnya penyelenggara aplikasi pinjaman online di Otoritas Jasa Keuangan tidak menjamin minimnya pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan⁸.

Pada era modern seperti saat ini dan didukung dengan kecanggihan teknologi pinjaman online merupakan aplikasi pinjaman uang secara digital yang digemari oleh masyarakat karena syarat pinjaman uang yang mudah dan proses pencairan uang yang cepat. Namun perlu diketahui sisi lain dari pinjaman online yaitu jika telah jatuh tempo pembayaran Kreditur tidak mau tau dan tidak mau menerima alasan apapun dari Debitur, jika telat dalam melakukan pelunasan maka Kreditur tidak segan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak seyogyanya seperti : melakukan pengancaman, pelecehan seksual, penyebaran data pribadi, pembuatan “grup khusus” di dalam aplikasi pesan singkat, dan penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam pada saat awal melakukan pinjaman.

Pada saat melakukan pinjaman online Debitur cukup mendownload aplikasi pinjaman online kemudian mengisi identitas disertai dengan melakukan selfi atau dengan mengirimkan

⁸ <https://www.bantuanhukum.or.id/web/usut-tuntas-tindak-pidana-pinjaman-online-jangan-berhenti-di-desk-collector> dikutip pada hari rabu 23 oktober 2019 pk1.23.24.

foto ktp, selanjutnya Debitur diminta untuk klik centang menyetujui pada aplikasi tersebut agar uang yang dipinjam bisa dicairkan. Perlu diketahui bahwa pada saat Debitur melakukan klik menyetujui pada aplikasi pinjaman online Debitur tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut. Bahwa dalam hal tersebut telah terjadi klausula baku yang hanya diketahui salah satu pihak atau pihak Kreditur saja yang mengetahui klausula baku. Oleh sebab itu ketika Debitur telah melakukan pelunasan pihak Kreditur dengan leluasa dapat menyebarkan data pribadi Debitur ke seluruh kontak yang tersimpan di ponsel Debitur.

Pada saat jatuh tempo pelunasan Kreditur melakukan penagihannya dengan menelfon Debitur secara terus menerus dan dengan kata-kata yang kasar. Ada juga Kreditur yang langsung menyebarkan data pribadi Debitur atau membuat grup whatsapp yang terdaftar di kontak Debitur kemudian Kreditur melakukan penagihan hutang di dalam grup tersebut sehingga akibatnya membuat malu Debitur karena hal tersebut merupakan hal yang sangat pribadi.

Perkembangan penggunaan aplikasi pinjaman dana online semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada tahun 2017, terdapat 237.159 nasabah yang mengajukan pinjaman secara online untuk mendapatkan dana segar. Jumlah tersebut melebihi hingga 581% dari pencapaian pada tahun 2016 sebanyak 38.105 orang. Tingginya pertumbuhan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah disebabkan oleh banyaknya perusahaan fintech yang menyediakan jasa pinjaman secara Online. Mengacu pada data dari OJK jumlah perusahaan pemberi pinjaman atau kredit online pada tahun 2017 mencapai 100.940 dengan dana pinjaman senilai 2,56 triliun.⁹

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan *Fintech* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi menjelaskan perusahaan fintech khususnya *peer to peer lending* tidak dapat melakukan penagihan pinjaman bermasalah dengan melibatkan pihak ketiga atau

⁹ www.online-pajak.com

rekan Debitur. Terlebih, penagihan tersebut disertai teror dan intimidasi rekan Debitur yang tidak memiliki sangkut paut terhadap pinjaman tersebut Menurutnya, hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹⁰ Menurut pemaparan Hendrikus dalam acara diskusi dan pameran *Fintech Fair* 2018 di Center Atrium Mal Taman Anggrek, Jakarta pada tanggal 13 juli 2018 menyatakan bahwa bagi penyelenggara (perusahaan *fintech*) harus mengedepankan prinsip perlakuan yang adil. Menteror dengan menelepon tetangganya ini merupakan tindakan tidak adil.

Selain mekanisme penagihan tersebut, Hendrikus juga menekankan agar perusahaan fintech menjaga kerahasiaan data Debitur agar tidak disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “Kerahasiaan data konsumen juga harus diperhatikan. Saya berharap penyelenggara fintech tidak semena-mena dalam bertindak,” Hendrikus melanjutkan.

Di sisi lain, konsumen juga diminta bertanggung jawab terhadap segala bentuk pinjaman yang didapatkan. Hendrikus menjelaskan sama halnya dengan industri keuangan lain, industri fintech juga memiliki risiko yang juga harus ditanggung konsumen. “Konsumen juga harus menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan sengketa dengan penyelenggara fintech. Sebab, dalam UU Perlindungan Konsumen, hanya konsumen yang beritikad baik yang berhak dilindungi,” lanjutnya.

Selain itu juga menyalahgunakan data pribadi seperti yang tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang perubahan atas undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹¹ Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) yang berlaku sejak Desember 2016 tersebut, perlindungan data pribadi yang mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan,

¹⁰ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

Menurut Peraturan dari Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, dan berhak untuk mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi yang dialaminya. serta berhak untuk mendapatkan akses dalam memperoleh historis data pribadinya; dan berhak untuk meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya di dalam sistem elektronik.

Latar belakang sebagaimana yang diungkapkan di ataslah yang menjadi daya tarik dari penulis untuk mengkaji masalah ini dengan lebih seksama. Maka dari itu penulis bermaksud untuk menyusun skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KREDITUR FINTECH KEPADA DEBITUR YANG TELAT DALAM MELAKUKAN PELUNASAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh Kreditur fintech terhadap Debitur yang telat dalam melakukan pelunasan?.
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Debitur atas tindak pidana yang dilakukan oleh Kreditur fintech?.

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan dapat memecahkan permasalahan yang telah di rumuskan maka perlu kiranya di tetapkan beberapa tujuan yang hendak di capai dalam penelitian tugas akhir ini :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh Kreditur fintech terhadap Debitur yang telat dalam melakukan pelunasan.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Debitur atas tindak pidana yang dilakukan oleh Kreditor fintech.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil apabila penelitian tersebut dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dicapai dalam penulisan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas Hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program Hukum pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menamhah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang;

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sekaligus kritik bagi pihak terkait seperti pihak otoritas jasa keuangan dan kepolisian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi Kepolisian, Otoritas jasa keuangan dan pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan hukum dan memberikan wacana baru bagi para pemangku kepentingan untuk dapat merumuskan konsep dan teknis problematika

hukum yang terjadi pada masyarakat agar dapat terlindunginya hak setiap warga negara indonesia.

F. Metode Penelitian

Salah satu faktor penting dalam penulisan karya ilmiah adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan serta berfungsi untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.¹² Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*normatif legal research*). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.¹³

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penulisan, sehingga metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum serta membandingkan dengan masalah yang sedang diteliti dalam berbagai literatur yang dapat menunjang dalam penulisan ini.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2007. Penelitian Hukum. Jakarta, Kencana, hlm. 30

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14

2. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008
3. Peraturan Menteri Kominfo No.20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
4. POJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
5. OJK No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Sebagai Ketentuan Yang Memayungi Pengawasan Dan Pengaturan Industri Financial Teknologi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian berupa skripsi/tesis, makalah seminar, dan lainnya yang relevan dengan judul penelitian maupun sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpuln bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan seperti Peraturan Perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitan hukum, skripsi, Tesis, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis Prespektif Kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan komperehensif dari seluruh bahan hukum yang didapatkan untuk menghasilkan preskripsi atau argumentaasi hukum yang baru.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini terbagi dalam dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang berguna untuk mempermudah pemahaman. Adapaun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode, dan sistematika.

¹⁴ Jhony Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang Bayumedia, hlm. 392

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

menguraikan mengenai tinjauan semua tentang teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, adapun tinjauan pustaka tersebut terdiri dari : pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Kreditur fintech kepada Debitur yang telat dalam melakukan pelunasan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan latar belakang yang dilakukan analisa dan kajian dengan bahan hukum, teori yang terdapat di tinjauan pustaka didiskripsikan sehingga memberikan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan serta saran-saran yang disampaikan oleh penulis.

